

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, potensi yang ada di dalam diri seseorang bisa berkembang, sehingga manusia menjadi lebih cakap, terampil, dan berakhlak, sebagai bekal untuk kehidupan di masa depan. Selain itu, pendidikan juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi (Nining Sartika et al., 2023).

Menurut UU No.20 Tahun 2003 Pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terstruktur yang bertujuan membentuk lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk mengoptimalkan potensi diri yang mencakup dimensi spiritual-religius, pengendalian diri, kepribadian matang, kecerdasan intelektual, akhlak terpuji, serta beragam keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk pengembangan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, mutu pendidikan menjadi kebutuhan sekaligus syarat utama yang harus dipenuhi. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan, direncanakan secara sistematis, dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan (Wahyudi et al., 2022).

Tanggung jawab peningkatan mutu pendidikan bersifat kolektif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Amanat ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, terutama melalui partisipasi orang tua dan tokoh pendidikan lokal, menjadi variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi program sekolah.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah

satu strategi desentralisasi pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan pendidikan dengan memberikan kewenangan lebih luas serta fleksibilitas kepada sekolah, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Miyono, 2024). Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta pengelolaan pendidikan yang lebih efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Hal tersebut diperjelas melalui peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah republik indonesia (Permendikdasmen) nomor 26 tahun 2025 yang menyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dalam mengelola kegiatan pendidikan (Permendikdasmen, 2025).

Komite Sekolah memiliki posisi yang sangat penting dalam model Manajemen Berbasis Sekolah. Komite sekolah didirikan di lingkungan sekolah sebagai lembaga kolaboratif untuk membantu mengelola dan mengawasi kegiatan Pendidikan. Dalam sistem manajemen berbasis sekolah yang berbasis otonomi dan partisipatif, Komite Sekolah berfungsi sebagai mitra strategis yang esensial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal (Widyawan et al., 2024).

Keputusan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang acuan pembentukan komite sekolah, disebutkan bahwa komite sekolah memegang peran-peran utama sebagai berikut: pertama, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan program, kedua; sebagai pendukung dengan memberikan bantuan finansial, pemikiran, atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; ketiga, Sebagai pengawas terhadap layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, serta sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat disatuan pendidikan.

Dalam konteks MBS, peran tersebut menjadi instrumen penting sesuai dengan prinsip MBS mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Keterlibatan Komite Sekolah diharapkan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Hal ini

selaras dengan perintah Allah SWT untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, Allah swt berfirman di dalam Q.S Al-Maidah/5 :2 yang berbunyi:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam kebaikan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks MBS, kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat melalui Komite Sekolah merupakan bentuk implementasi nilai tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Komite Sekolah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sekolah yang efektif serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi MBS tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, khususnya melalui Komite Sekolah. Padahal, Komite Sekolah memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, serta menjadi mediator antara sekolah dengan masyarakat.

SMP Negeri 1 Gunung Jati telah mengimplementasikan beberapa prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan pendidikannya. Hal tersebut tercermin dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilaksanakan secara terstruktur, pengembangan kompetensi guru dan peningkatan mutu pembelajaran seperti melalui pengikutsertaan tenaga pendidik dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Sekolah juga melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan program peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yaitu menyusun program yang sesuai dengan minat siswa, serta pembinaan karakter peserta

didik melalui disiplin rutin (piket, upacara), penguatan religius (pembiasaan sholat dhuha berjama'ah), dan budaya peduli lingkungan.

Secara administratif dan struktural, praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa prinsip otonomi dan akuntabilitas dalam MBS telah diupayakan. Namun, keberhasilan implementasi MBS tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan atau terlaksananya program sekolah, melainkan juga dari sejauh mana partisipasi pemangku kepentingan berjalan secara aktif.

berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan bahwa peran komite sekolah dalam implementasi MBS belum sepenuhnya menunjukkan partisipasi yang aktif. Komite Sekolah lebih sering dilibatkan pada tahap akhir, seperti pengesahan atau penandatanganan dokumen perencanaan, tanpa keterlibatan yang optimal dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan sejak tahap awal, forum rapat yang melibatkan Komite Sekolah belum dilakukan secara terjadwal, sehingga ruang diskusi bersama dalam menentukan arah kebijakan sekolah masih terbatas.

Meskipun pihak sekolah tetap menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan kepada komite sekolah, penyampaian tersebut lebih bersifat informatif daripada partisipatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal Manajemen Berbasis Sekolah dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, sekolah juga tidak secara aktif melibatkan komite dalam proses perencanaan maupun evaluasi dalam kegiatan sekolah.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan praktik di lapangan yang menunjukkan kecenderungan pasifnya peran Komite Sekolah. Berdasarkan kesenjangan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keterlibatan Komite Sekolah lebih banyak pada tahap akhir (pengesahan/penandatanganan dokumen).
2. Forum rapat koordinasi yang melibatkan Komite Sekolah belum dilakukan secara rutin/ terjadwal.
3. Penyampaian program sekolah kepada Komite Sekolah masih bersifat informatif, bukan partisipatif.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkupnya dibatasi pada kajian mengenai Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Penelitian ini hanya membahas keterlibatan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), serta tidak mencakup pembahasan mengenai keseluruhan manajemen sekolah di luar konteks tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komite dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Peranan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan literatur mengenai Analisis Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan komprehensif tentang Analisis peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati.

2. Bagi Komite Sekolah

Sebagai informasi dasar merumuskan strategi peningkatan kinerja dan mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati.

3. Bagi Sekolah

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pihak sekolah dalam upaya membangun sinergi dan koordinasi dengan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Jati.